

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PAM JAYA

Pengambilalihan Belum Rampung

JAKARTA, KOMPAS — Hingga menjelang pergantian tahun, Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) belum rampung membicarakan realisasi pengambilalihan pengelolaan air dari dua mitra swastanya. Penghentian konsesi pengelolaan air minum bagi swasta menjadi langkah strategis DKI guna meningkatkan cakupan layanan air bagi warga.

PAM Jaya baru menandatangani kesepakatan awal (*head of agreement/HoA*) dengan pemegang hak eksklusif pengelolaan air di DKI wilayah timur, PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

HoA dengan mitra swasta pengelola layanan air di barat, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), belum tercapai. Padahal, HoA dengan keduanya ditargetkan rampung Maret silam.

"Untuk mitra satunya lagi (Palyja), kami ada *high level discussion* guna mengajak mereka untuk percepatan (perluasan) akses air bersih," ucap Direktur Utama PAM Jaya Pri-

yatno Bambang Hernowo, Senin (16/12/2019), di Jakarta.

Bersama Aetra, PAM Jaya masih memerinci HoA. Hernowo yakin, dalam waktu tidak lama lagi bakal ada titik-titik perubahan skema kerja sama.

Hernowo mengatakan, perubahan skema kerja sama membuat PAM Jaya memegang kendali pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM). Saat ini, berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Aetra dan Palyja, PAM Jaya hanya punya fungsi supervisi SPAM, sedangkan pengelolaan hak kedua mitra swasta.

Keterbatasan wewenang menyulitkan pemprov meningkatkan cakupan akses layanan air bersih. Hingga 2008, PAM Jaya baru memenuhi 60 persen kebutuhan air minum perpipaan warga Jakarta. Ada selisih 22 persen dari target 82 persen pada 2023. Artinya, setiap tahun cakupan mesti bertambah rata-rata 5,5 persen. Saat ini,

kenaikan cakupan layanan hanya rata-rata 2 persen setahun.

Saat pertama kali DKI memutuskan mengambil alih pengelolaan air minum, 11 Februari 2019, Gubernur DKI Anies Baswedan menyebutkan, dengan jangka waktu yang tinggal sebentar lagi, hampir mustahil pihak swasta melakukan investasi peningkatan layanan.

Pengacara publik yang mengadvokasi penghentian swastanisasi air, Nurkholis Hidayat, meminta DKI mendata keluhan pelanggan Palyja dan Aetra selama memproses pengambilalihan pengelolaan air. Setiap bulan, pelanggan membayar abonemen dan sebagainya, tetapi tidak mendapatkan airnya.

Presiden Direktur Palyja Robert Rerimassie menyampaikan, sekitar 1.200 kilometer pipa mesti diganti, dengan perkiraan investasi Rp 2,2 triliun. "Kami tidak mungkin melakukan investasi sebelum kami punya perjanjian," ucapnya (Kompas.id, 27/4/2019). (JOG)